

2025

RENCANA AKSI

LAPORAN BY:

BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

**DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan ke Hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dapat menyusun Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025.

Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja disusun sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Aksi Capaian Kinerja ini dapat dijadikan pedoman terkait pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan sesuai perjanjian kinerja pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tahun 2025

Purwakarta, 06 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA



EKA SUGRIYANA, SP, MM
Pembina Tk.I

NIP. 19700407 199803 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Aksi	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN	
2.1. Tugas dan Fngsi.....	6
2.2. Struktur Organisasi.....	7
2.3. Sumber Daya Manusia.....	9
2.4. Kinerja Layanan.....	11
BAB III RENCANA AKSI	
3.1. Visi dan Misi.....	13
3.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.....	14
3.3. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2025.....	15
BAB IV PENUTUP.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam siklus manajemen pengelolaan kinerja, dimana komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi harus saling terkait, berkesinambungan dan dapat dijalankan dengan efisien dan efektif. Komponen perencanaan dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah menyusun Rencana Aksi Capaian Kinerja sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya dokumen Perjanjian Kinerja. Rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tahun 2025 ini memiliki peran yang sangat penting sebagai panduan dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Aksi

Dasar hukum penyusunan rencana aksi kinerja, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja ;
6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta

Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan laporan rencana aksi adalah tersusunnya rencana aksi Tahun 2025, dan tujuan disusunnya rencana aksi yaitu :

- a. Untuk merencanakan pencapaian target kinerja Tahun 2025 secara berkala;
- b. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Untuk memudahkan dalam monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pada Tahun 2025;
- d. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi ,UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Rencana Aksi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Rencana Aksi
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN

- 2.1 Tugas dan Fungsi
- 2.2 Struktur Organisasi
- 2.3 Sumber Daya Manusia
- 2.4 Kinerja Pelayanan

BAB III RENCANA AKSI TAHUN 2025

- 3.1. Visi dan Misi
- 3.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
- 3.3. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

BAB II

GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN

2.1. Tugas dan Fungsi

Dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai mana tersebut di atas, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

4. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha, Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Susunan organisasi Dinas koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekertaris, terdiri atas :
 1. Sub bagian keuangan
 2. Sub bagian Kepegawaian dan Umum
 3. Perencana Ahli Muda
- c. Bidang Koperasi, terdiri atas :

Kelompok Jabatan fungsional Pengawas Koperasi
- d. Bidang Usaha Kecil Menengah terdiri atas :

Kelompok Jabatan fungsional Analisis Kebijakan

e. Bidang Perdagangan, terdiri atas ;

Kelompok Jabatan fungsional Penyuluh Perindustrian dan
Perdagangan

f. Bidang Perindustrian, terdiri atas ;

Kelompok Jabatan fungsional Penyuluh Perindustrian dan
Perdagangan

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri atas;

1. UPTD Pasar Juma'ah dan Pasar Ki Sunda Leuwipanjang

2. UPTD Pasar Wanayasa

3. UPTD Pasar Citeko Plered;

4. UPTD Metrologi Legal dan

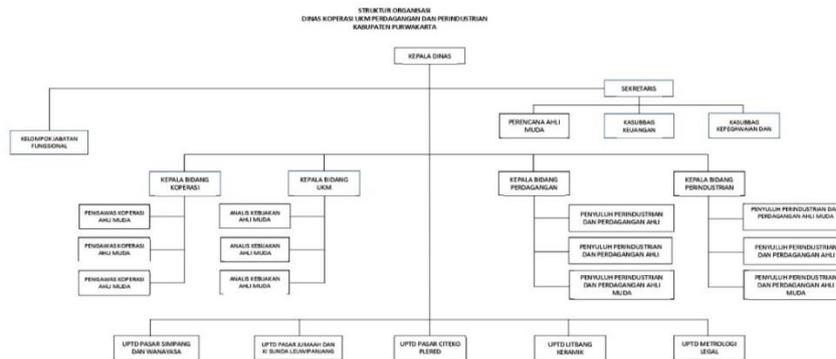
5. UPTD Pengembangan Sentra Keramik;

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Dinas Koperasi,
UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dapat
di lihat pada bagan struktur organisasi berikut ini :

Tabel 2.1

Bagan Struktur Organisasi



2.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Koperasi ,UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta setelah di berlakukannya Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta adalah sebanyak ... orang, yang susunannya terinci sebagai berikut :

a. Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Jumlah
1	Pejabat Struktural	13
2	Jabatan Fungsional	20
3	Non PNS	49

b. Susunan Pegawai Berdasarkan Bagian, Bidang dan UPTD

No	Uraian	Jumlah
1	Sekretariat	28
2	Bidang Koperasi	7
3	Bidang UKM	4
4	Bidang Perdagangan	11
5	Bidang Perindustrian	6
6	UPTD Pasar Leuwipanjang	18
7	UPTD Pasar Simpang dan Pasar Wanayasa	8
8	UPTD Pasar Citeko	13
9	UPTD Metrologi Legal	10
10	UPTD Pengembangan Sentra Keramik	7

c. Susunan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1	Sarjana Strata 2	4
2	Sarjana Strata 1	39
3	Diploma 3	7
4	SMA/SMK	46
5	SMP	7
6	SD	7

d. Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Jumlah
1	Golongan IV	3
2	Golongan III	37
3	Golongan II	17
4	Golongan I	2
5	PPPK	4
6	Non PNS	49

2.4. Kinerja Pelayanan

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yang dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, hal-hal yang menjadi ukuran keberhasilan/ Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah:

1. Persentase Koperasi Aktif
2. Pertumbuhan UMKM
3. Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB
4. Capaian SAKIP Perangkat Daerah
5. Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hal pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut,

untuk persentase koperasi aktif dari target 89,7 terealisasi 85,94, untuk 4 (empat) indikator lainnya tercapai.

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	Persen	89,7	85,94	95,81%
		Pertumbuhan UMKM	Persen	11,86	11,86	100%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	Rp	46.782.449.072	46.782.449.072	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	A	A	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	100

BAB III

RENCANA AKSI TAHUN 2025

3.1. Visi dan Misi

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, yaitu: “ Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berakhlakul Karimah”.

Untuk mencapai visinya, Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengemban misi yang diharapkan mendorong Kabupaten Purwakarta dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai. Adapun kelima misi tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal
4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang

Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta sebagai bagian dari satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta berperan untuk mewujudkan Misi ke-3 (tiga) Pemerintah Kabupaten Purwakarta yaitu Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal.

3.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Mengacu pada Visi Misi dalam RPD 2024-2026 Kabupaten Purwakarta, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta sebagai unsur pelayanan Pemerintahan Daerah yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta mendukung pencapaian Misi ke- 3 yaitu “Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal.” dengan Sasaran RPD yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian”.

Tujuan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta yang hendak dicapai periode 2024-2026 adalah “Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel”.

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta berdasarkan hasil penyusunan Indikator Kinerja Utama, indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta pada tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke Tahun			Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	
Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	89,7	89,8	90,05	269.55
		Pertumbuhan UMKM	11,86	13,16	14,69	39.71
	Meningkatnya Usaha Perdagangan dan Perindustrian	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	46.782.449.072	47.737.192.933	48.711.421.360	143.231.063.365
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik

3.3. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025 Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta mengelola anggaran yang bersumber dari APBD dan DBHCHT yaitu sebesar Rp. 18.634.030.658, (Delapan belas milyar enam ratus tiga puluh

empat juta tujuh tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh delapan Rupiah) dengan rincian :

Tabel 3.2
Uraian Anggaran

No	Uraian Belanja	Rancangan Anggaran
1	Belanja operasi	18.505.537.658
2	Belanja modal	128.493.000
	Jumlah	18.634.030.658

Adapun Rencana Aksi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target Triwulan				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Jadwal Pelaksanaan Triwulan			
			I	II	III	IV						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	√	√	√	√	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah		15.110.522.858				
		Indeks Kepuasan Masyarakat							Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	268.748.407					
									Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	141.697.407	√	√	√	√
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.496.000				√
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.633.000			√	
									Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.472.000				√
									Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4.471.000			√	
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.719.000	√			
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.260.000	√	√	√	√				

							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.883.486.457				
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10.864.480.457	√	√	√	√
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.503.000			√	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.503.000	√	√	√	√
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.445.426				
							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.687.426		√		
							Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.758.000	√	√	√	√
							Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	45.147.500				
							Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4.119.500			√	
							Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	41.028.000	√	√	√	√
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	149.998.000				
							Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		10.000.000	√	√	√	√
							Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	71.390.000	√			
							Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	18.608.000	√	√	√	√
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000		√		

Administrasi Umum Perangkat Daerah							Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Yang Diberikan	1.257.933.500				
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25.000.000	√	√	√	√
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	80.251.000	√			
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30.922.500	√	√	√	√
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	893.470.000	√	√	√	√
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100.000.000	√			
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	√	√	√	√
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	√	√	√	√
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.290.000	√	√	√	√

							PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		50.000.000				
							Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota]	Jumlah ijin usaha koperasi simpan pinjam kewenangan kabupaten yang diterbitkan	50.000.000				
							Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	√	√		
2			√	√	√	√	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		100.000.000				
							Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	100.000.000				
							Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	√	√		√
							PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi Yang Dinilai Kesehatan	221.000.000				
							Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang di nilai kesehatannya	221.000.000				
							Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	221.000.000		√	√	
							PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	200.000.000				
							Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	200.000.000				
							Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	200.000.000	√	√	√	

3			√	√	√	√	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		423.208.900				
							Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah fasilitasi UKM dalam pemberdayaan	423.208.900				
							Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	44.900.000	√			
							Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinann	121.839.500	√	√	√	√
							Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap UsahaMikro	80.018.000			√	√
							Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas danKompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	150.000.000			√	
							Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	26.451.400	√	√		
							PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		600.000.000				
							Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	600.000.000				
							Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, sertaDesain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan,Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	600.000.000			√	
4	Terciptanya kelancaran jalur distribusi barang	Jumlah komoditi barang yang di distribusikan	√	√	√	√	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Terfasilitasinya Rekomendasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	100.000.000				
							Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	20.000.000				
							Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat,Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, PusatPerbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik	20.000.000			√	

			√	√	√	√	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		850.000.000				
							Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	850.000.000				
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	250.000.000	√			√
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	100.000.000		√		
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	500.000.000	√	√	√	√
							PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		50.000.000				
							Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000				
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	50.000.000	√		√	
							PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		50.000.000				
							Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri Kabupaten/Kota	50.000.000				
							Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	50.000.000		√		
							Jumlah		18.634.030.658				

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Kinerja merupakan dokumen yang berisikan jadwal rencana pelaksanaan perjanjian kinerja yang menyangkut sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator dan target yang ditetapkan sesuai anggaran yang telah disetujui.

Rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2025 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2025, serta sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja sangat tergantung dari tingkat kematangan dalam penyusunan perencanaan. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari alternatif terhadap langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta dapat mengantisipasi adanya permasalahan/ faktor penghambat yang timbul. Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-

benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Purwakarta, 06 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA



EKA SUGRIYANA, SP, MM
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 19700407 199803 1 008